

**SCHOOL SELF-EVALUATION ANALYSIS EAST KALIMANTAN
YEAR 2010 (ANALISIS EVALUASI DIRI SEKOLAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010)**

Abstrak

School Self-Evaluation Analysis (EDS) 2010 were to determine the ranks of schools in implementing (1) the standards of facilities and infrastructure, (2) the standards of content, (3) the standards of process, (4) assessment standards of education, (5) competency standards, (6) management standards, (7) the standards of educators and education personnels, and (8) the standards of financing? The documentation anylisis technique that was used to answer these problems is EDS documents. The following are the results; (1) the schools can used EDS as a tool to measure the ranks of achievement of the national education standards (SNP); (2) In general, elementary school (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) have met the 8 (eight) national standards of education - although there were schools that had exceeded the national standards of education, it was also found that there were schools which only met the minimum standards of service, or even under the standards of service; (3) In general secondary school (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) have met the 8 (eight) national standards of education-although there were schools that had exceeded the national standards of education, it was also found that there were schools which only met the minimum standards of service, or even under the standards of service; (4) In general senior high school (SMA)/Vocational School (SMK)/Madrasah Aliayah (MA) have met 8 (eight) national standards of education - although there were schools that had exceeded the national standards of education, it was also found that there were schools which only met the minimum standards of service, or even under the standards of service.

Key words : *School Self-Evaluation, SNP, and SPM*

Pramujono adalah Dosen Universitas Mulawarman Kaltim

Latar Belakang

Persyaratan menjadi kepala sekolah/madrasah telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Selain kualifikasi, kompetensi kepala sekolah diatur dalam peraturan diatas seperti kompetensi: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Kementerian Pendidikan Nasional juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dimana Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan komponen penting penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. EDS sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen satuan pendidikan harus dilakukan oleh kepala sekolah.

Tindakan tersebut dalam rangka memperbaiki kinerja sekolah setelah kepala sekolah mengetahui dengan tepat posisi pelayanan sekolah berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian perian standar nasional pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, standar itu meliputi (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Bila EDS ini dilakukan oleh kepala sekolah, akan diketahui potret sesungguhnya persekolah di Indonesia.

Kalimantan Timur memiliki wilayah yang sangat khas, wilayah itu meliputi perbatasan, pedalaman, perkotaan, dan pesisir. Wilayah tersebut memberi pengaruh terhadap pelayanan masyarakat akan pendidikan di satuan wilayahnya. Kepala sekolah yang ditugaskan pada wilayah itu, melalui EDS akan menggambarkan apa adanya mengenai pelayanan pendidikan berdasarkan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Bertolak dari pemikiran di atas, maka dianggap perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan melalui evaluasi diri sekolah, oleh karena itu penelitian ini diturunkan dengan judul Analisis Evaluasi Diri Sekolah.

Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: apakah melalui evaluasi diri sekolah dapat diketahui peringkat sekolah dalam melaksanakan (1) standar sarana dan prasarana, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian pendidikan (5) standar kompetensi lulusan, (6) standar pengelolaan (7) standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan (8) standar pembiayaan.

Tujuan Analisis

Tujuan penelitian ini dirumuskan (1) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan sarana dan prasarana, (2) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar isi, (3) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar proses, (4) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar penilaian pendidikan, (5) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan, (6) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar pengelolaan, (7) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan (8) mengetahui peringkat sekolah dalam melaksanakan standar pembiayaan penilaian pendidikan.

Jenis Penelitian, Metode dan Dokumen Analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentasi. Alasannya, bidang penelitiannya adalah dokumen, yakni dokumen mengenai pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dijaring melalui instrumen evaluasi diri sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguraikan, yakni menguraikan tingkat pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan

prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam periode satu tahun pelajaran yakni tahun pelajaran 2010. Selanjutnya, dokumen analisis adalah dokumen pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dijamin melalui instrumen evaluasi diri sekolah.

Konsep Evaluasi Diri Sekolah

Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009 telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 63 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Peraturan Menteri tersebut dijadikan acuan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan tercipta "budaya" peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Salah satu komponen utama program SPMP adalah program Evaluasi Diri Sekolah atau EDS yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Supported School Self Evaluation (SSSE)*. Program ini menuntut sekolah untuk secara internal melakukan evaluasi sendiri kinerjanya berdasarkan Sistem Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Seperti tersirat dalam istilah Inggrisnya dengan adanya kata *Supported*, program ini memandang penting adanya dukungan penuh pada kegiatan Evaluasi diri ini dari semua unsur dan pemangku kepentingan yang terlibat di sekolah sehingga bukan hanya Kepala sekolah saja yang terlibat tapi juga para guru, Komite Sekolah, wakil orang tua peserta didik serta mendapat bimbingan dari Pengawas Sekolah. Dalam pelaksanaan EDS yang baik, perlu adanya *support* yaitu dukungan atau bantuan dari berbagai pihak terkait agar sekolah dapat melaksanakan EDS secara bersama sehingga akan terjadi kebersamaan dalam tindakan dan nantinya dalam tanggung jawab juga. EDS diharapkan akan memberikan dasar yang nyata untuk membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)/Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang solid untuk peningkatan kinerja sekolah dan dasar terciptanya budaya mutu di sekolah.

EDS adalah evaluasi internal yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholders*) di sekolah untuk mengetahui secara menyeluruh kinerja sekolah dilihat dari pencapaian SPM dan 8 SNP dan mengetahui kekuatan dan kelemahannya secara pasti sehingga akan diperoleh masukan dan dasar nyata untuk membuat RPS/RKS dalam upaya untuk menumbuhkan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

- a. Evaluasi yang bersifat internal – dilakukan oleh dan untuk mereka sendiri, bukan dilaksanakan oleh orang lain. Ini adalah evaluasi internal, bukan evaluasi external oleh pihak luar.
- b. Akan mengevaluasi seluruh kinerja sekolah yang akan meliputi aspek-aspek manajerial dan akademis.
- c. Mengacu pada SPM dan 8 SNP yang hasilnya akan membantu program nasional dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan secara umum.
- d. Untuk kepentingan sekolah itu sendiri, bukan untuk perbandingan dengan sekolah sekolah lain atau untuk akreditasi sekolah.

- e. Hasil EDS sebagai bahan masukan dan dasar dalam penulisan RPS/RKS maupun RAPBS/RAKS.
- f. Dilaksanakan minimal setahun sekali oleh semua stakeholder pendidikan di sekolah, bukan hanya oleh kepala sekolah/madrasah saja dengan bimbingan dan pengawasan Pengawas sekolah.

EDS disekolah diperlukan sebab sampai sekarang belum ada satupun alat yang dapat dipakai oleh sekolah untuk memberikan gambaran umum dalam aspek SPM dan 8 SNP secara nyata, akurat dan berdasarkan bukti-bukti tentang seluruh kinerja sekolah sebagai dasar untuk membuat RPS/RKS dan peningkatan mutu professional seluruh pemangku kepentingan sekolah. Walaupun sudah ada beberapa upaya evaluasi di sekolah, kebanyakannya adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar, jadi sifatnya eksternal, untuk menilai sekolah misalnya akreditasi, dan pemberian bantuan untuk sekolah. Dengan demikian kehadiran EDS amat diperlukan oleh sekolah karena evaluasi ini adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh dan untuk sekolah sendiri guna mengetahui kekuatan dan kelemahannya keadaan itu seperti cermin muka yang dapat dipakai dalam melihat kekuatan dan kelemahannya sendiri untuk selanjutnya dipakai dasar dalam upaya memperbaiki kinerjanya.

EDS dilaksanakan oleh semua *stakeholder* atau pemangku pendidikan di sekolah sebab EDS bukan hanya tugas dan tanggung jawab kepala sekolah saja melainkan secara bersama dengan *stakeholder* agar diperoleh kebersamaan dan rasa memiliki bersama. Keterlibatan mereka juga diharapkan akan dapat memberikan gambaran akan kebutuhan nyata sekolah secara menyeluruh. Untuk menangani EDS sekolah membentuk satu tim EDS khusus yang bisa disebut Tim Pengembang Sekolah (TPS) dengan beranggotakan unsur-unsur dibawah ini:

- a. Kepala sekolah/madrasah sebagai penanggung jawab.
- b. Wakil dari unsur tenaga pendidik.
- c. Wakil dari unsur Komite Sekolah.
- d. Wakil dari unsur orang tua peserta didik.
- e. Pengawas sebagai pihak yang memberi bimbingan.

Karena kedudukannya, Pengawas bisa dianggap sebagai anggota TPS atau bukan anggota TPS. Yang penting adalah dia terlibat dalam EDS di sekolah yang menjadi binaannya dalam memberikan bimbingan dan masukannya dalam pelaksanaan EDS. Pelaksanaan EDS dilapangan juga melibatkan para tenaga pendidik lainnya di sekolah, khususnya ketika membicarakan standar-standar yang berhubungan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan demikian EDS dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di sekolah dan bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah saja. Terdapat beberapa manfaat EDS:

1. Bagi Sekolah:

- a. Sekolah mempunyai alat atau instrument internal yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerjanya.
- b. Sekolah dapat mengetahui sampai dimanakah tingkat pencapaian mereka dilihat dari SPM dan SNP.
- c. Sekolah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya secara pasti.

- d. Sekolah dapat mengetahui dengan pasti dan dapat memprioritaskan aspek mana yang memerlukan peningkatan.
- e. Sekolah dapat memperoleh dasar nyata untuk membuat RPS/RKS dan RAPBS/RAKS berdasarkan kebutuhan nyata sekolah, bukan atas dasar asumsi atau perkiraan saja
- f. Sekolah dapat mengetahui perkembangan upaya peningkatan mutu pelayanan mereka sebab EDS dilakukan secara berkala.

2. Bagi Sistem Pendidikan di Kab/Kota:

- a. Diperolehnya informasi kongkrit keadaan umum sekolah dalam pencapaian SPM dan 8 SNP.
- b. Terdapatnya gambaran umum secara pasti tentang kinerja sekolah-sekolah ditingkat kab/kota.
- c. Adanya dasar untuk kegiatan perencanaan ditingkat kab/kota serta dasar pemberian bantuan ke sekolah-sekolah di daerah itu.

Instrumen Evaluasi Diri

Instrumen EDS ini mengacu kepada SPM dan SNP dan karenanya menanyakan secara rinci semua hal yang berkenaan dengan aspek-aspek pada tiap standar. Beberapa butir penting mengenai Instrumen ini:

- a. Instrumen EDS mengacu pada SPM dan SNP-seluruh 13 butir dalam SPM yang berhubungan sekolah tapi tidak memasukkan 14 butir lainnya yang bersangkutan dengan pemerintah kab/kota serta 8 SNP.
- b. Instrumen EDS mencakup beberapa pertanyaan pokok pada tiap standar yang terkait dengan SPM dan SNP sebagai dasar bagi sekolah untuk memperoleh informasi dan data secara rinci tentang kinerjanya secara kualitatif.
- c. Dalam Instrumen EDS, tiap standar dibagi dalam beberapa komponen yang diharap dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.
- d. Pada setiap komponen pada pertanyaan di tiap standar ada beberapa spesifikasinya untuk memperoleh informasi yang lebih komplit.
- e. Pada setiap aspek dari setiap standar terdiri dari 4 tingkatan pencapaian tingkat 1 berarti kurang, tingkat 2 berarti sedang, tingkat 3 berarti baik, dan tingkat 4 berarti amat baik.
- f. Pada tiap tingkat pencapaian terdapat beberapa indikator yang sesuai dengan tingkat pencapaian tersebut. Tingkat 2 sama dengan telah memenuhi kriteria SPM.

Dibawah ini contoh ragaan standar sarana dan prasarana, komponen pada tiap standar, spesifikasi dari komponen dan Indikator dari spesifikasi. Pada bagian akhir Komponen setiap standar, ada halaman ringkasan atau rekapitulasi untuk menuliskan hasil penilaian pencapaian yang diperoleh. Halaman ini terdiri dari beberapa kolom: bukti fisik sekolah yang menguatkan pengakuan atas tingkat pencapaiannya, ringkasan deskripsi sekolah menurut indikator dan berdasarkan bukti untuk menulis ringkasan temuan-temuan atas kinerja sekolah itu, serta kolom untuk menuliskan tingkat yang dicapai.

Temuan Terdahulu.

Penggunaan EDS di beberapa daerah piloting seperti Kabupaten Gresik di Jawa Timur, Kabupaten Boalemo di Gorontalo dan Kabupaten Muaro Jambi di Jambi memberi manfaat bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai bahkan melampaui standar nasional pendidikan (Modul EDS, 2010: 12 - 13).

Hasil Analisis

Peserta kegiatan pendidikan dan latihan penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah di LPMP dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 21 Desember 2010 berdasarkan target peserta berjumlah 1012 orang (lampiran 1 halaman 76) terdiri dari 777 orang kepala sekolah dan realisasi dari target yang tercapai sebesar 869 orang terdiri dari 669 orang kepala sekolah. Jumlah target dan sasaran yang dicapai berdasarkan kepala sekolah dapat dilihat pada tabel 1.

Target kepala sekolah yang melaksanakan dan melaporkan evaluasi diri sekolah (EDS) berjumlah 450 sekolah terdiri dari 284 SD, 99 SMP dan 67 SMA/SMK/MA. Dari jumlah yang melaporkan EDS dapat ditetapkan EDS yang lengkap sehingga dapat dianalisis berdasarkan satuan pendidikan 98 SD, 99 SMP dan 60 SMA/SMK/MA. Sekolah terambil 669 dengan kepala sekolah yang terealisasi mengikuti kegiatan penguatan kemampuan kepala sekolah terdapat 450 sekolah yang melaporkan evaluasi diri sekolah yang mereka pimpin, dan jumlah yang ada laporan EDS lengkap dapat dianalisis sebanyak 257.

Hal ini menunjukkan kurang seriusnya kepala sekolah dalam (1) mengikuti kegiatan EDS dilihat dari hasil penguasaan kemampuan EDS yang hanya mencapai 33,98 (Laporan Analisis kemampuan Kepala Sekolah, 2010. hal. 161) dan (2) pelaporan EDS yang tidak lengkap, ini disebabkan karena pola lama yang masih diterapkan para kepala sekolah dalam mengikuti pelatihan, tidak adanya inovasi terlihat masih terdapat kepala sekolah dalam melaporkan copy paste dari teman sejawat. Kondisi ini terlihat dari laporan PTS mereka dan sekedar membuat laporan asal kumpulan) tugas yang dibebankan pada in 2 kegiatan penguatan kepala sekolah.

Ketidak seriusan dalam membuat laporan juga berakibat pada pelaporan tidak menyerahkan sehingga pada in 2 tidak datang. Inovasi belum terbangun dengan pola pelatihan yang dilakukan oleh LPMP dengan pola in on in, mereka belum siap tidak berani untuk berbuat, membuat laporan dengan benar dan jujur dalam waktu yang pendek. Hasil rincian EDS terbagi menurut tingkat satuan pendidikan yang dijelaskan pada bagian berikut:

a. Sekolah Dasar

Standar yang dipenuhi setiap sekolah pada SD masih cukup bervariasi dari standar 1 sarana prasarana hingga standar 8 pembiayaan. Pada kelompok satuan pendidikan SD kurang lebih 20,41% Sekolah Dasar memenuhi kedelapan standar (SNP) yang ditetapkan pemerintah dari seluruh SD yang melaporkan dengan lengkap dan benar. Sedangkan 13,27% baru mencapai SPM dari kedelapan standar yang harus dipenuhi oleh sekolah dasar.

Rendahnya pencapaian ini sangat ditentukan oleh kelengkapan pelapor dalam melaporkan EDS secara lengkap atau tidak (dari 284 sekolah yang melaporkan hanya 98 SD yang lengkap). Hal ini menyebabkan tingkat ketercapaian menjadi rendah, kebingungan atau kurang pemahannya pengisian membuat asal-asalan dalam penentuan tingkat tercapai dan ketidak beranian kepala sekolah untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya. Budaya duplikat dari pekerjaan teman masih melekat pada kepala sekolah dalam melaporkan setiap data yang diminta.

Penguasaan pengetahuan yang dimiliki kepala sekolah dalam EDS juga menjadi penyebab untuk melaporkan atau tidak. Hasil laporan kemampuan kepala sekolah dalam pendidikan latihan penguatan kepala sekolah Kalimantan Timur baru mencapai 33,98 kompetensi yang dimiliki dalam penguasaan EDS, sedangkan kemampuan kepala SD penguasaan EDS baru mencapai 29,89. Untuk masing-masing standar yang dicapai dapat dijelaskan bahwa, pencapaian SNP atau lebih pada jenjang SD baru mencapai 43,88% dari seluruh sekolah yang melaporkan, terdapat 43,88% baru dalam tingkatan SPM (standar pelayanan minimal) atau mencapai tingkat 2 dan dalam standar sarana prasarana serta masih terdapat beberapa SD yang belum mencapai SPM.

Standar isi terdapat 61,22% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 36,73% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar isi. Pada standar proses tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 41,84% dan 17,35% mencapai SPM. Standar penilaian terdapat 63,27% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 20,41% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar penilaian. Pada standar kompetensi lulusan tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 60,20% dan 24,49% masih mencapai SPM atau pada tingkat 2.

Pencapaian standar pengelolaan terdapat 55,10% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 23,47% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar pengelolaan. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 60,20% dan 32,65% masih mencapai SPM. Standar pembiayaan pencapaian baru mencapai 26,53% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 13,27% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar pembiayaan pada satuan pendidikan SD.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan kajian terhadap instrumen evaluasi diri sekolah (EDS) pada satuan pendidikan SMP/MTs yang disusun atas dasar delapan SNP, maka dapat disimpulkan dari 99 sekolah dijadikan sampel yang menjadi prioritas perbaikan dalam rencana peningkatan mutu dan pengembangan sekolah pada RPS/RKs dan RAPBS/RKAS sebagai berikut:

1. Standar Sarana dan Prasarana pada butir 1.1 dan 1.2, masing-masing hanya mencapai 23,23% dan 39,39%, artinya keberadaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai, dan sekolah belum dalam kondisi terpelihara baik.
2. Standar Isi, pada butir 2.1 dan 2.2, masing-masing baru tercapai 56,57% dan 58,59%, yang berarti penerapan kurikulum masih belum sesuai dan relevan

- dengan kebutuhan setempat serta sekolah belum menyediakan bagi pengembangan pribadi peserta didik.
3. Standar Proses pada butir 3.2; 3.3; 3.4; 3,5; dan 3,6; masing-masing hanya terpenuhi 59,60%; 46,46%; 51,52%; 53,53%; dan 59,60% sumber belajar yang diperoleh masih terbatas pada buku teks saja, sumber lain tidak mudah didapatkan; berarti pencapaian standar proses belum memenuhi.
 4. Standar Penilaian Pendidikan belum terpenuhi, hal ini terlihat hanya 49,49% (butir 4.1), 44,44% (butir 4.2.), dan 46,46% (butir 4.3.) yang berhasil mencapainya.
 5. Standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi, karena hanya 38,38% pada butir 5.1., dan 55,56% pada butir 5.2. yang mencapainya.
 6. Standar Pengelolaan belum terpenuhi, karena hanya 48,48% (butir 6.1.), 47,47% (butir 6.2.), 37,37% (butir 6.3.), 38,38% (butir 6.4.), 42,42% (butir 6.5.), dan 45,45% (butir 6.5.) yang mencapainya. Artinya sekolah dalam kinerja pengelolaan, perbaikan tujuan dan rencana, program pengembangan sekolah, cara pengumpulan dan penggunaan data, dukungan terhadap pengembangan profesi, dan cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sekolah masih belum memadai.
 7. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan telah cukup terpenuhi 61,62% sekolah. Artinya, kebutuhan guru dan pegawai kependidikan pada 61 sekolah telah cukup terpenuhi.
 8. Standar Pembiayaan pada butir 8.1. dan 8.2. belum terpenuhi, karena hanya 45,45% (butir 8.1.) dan 46,46% (butir 8.2.) baru memenuhi pengelolaan keuangan, dan usaha-usaha sekolah dalam mencari tambahan dukungan pembiayaan.

Terdapat dua standar yang sudah dapat dianggap cukup baik, yaitu (1) Standar Proses pada butir 3.1 (66,67%) bahwa silabus sudah sesuai/relevan dengan standar, yakni pengembangan silabus berdasarkan SI, SKL, dan panduan KTSP, dan diarahkan kepada pencapaian SKL. (2) Standar Pembiayaan, butir 8.3. (84,85%) sekolah telah mempunyai cara penjaminan kesetaraan akses, berarti sekolah dengan baik mengelola keuangan dan sumbangan orang tua siswa sekolah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua dan sekolah melakukan subsidi silang kepada siswa kurang mampu di bidang ekonomi.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada setiap kategori standar dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung mencapai indikator pencapaian Tingkat 2. Standar yang dipenuhi setiap sekolah pada SMP masih cukup bervariasi dari standar 1 sarana prasarana hingga standar 8 pembiayaan. Pada kelompok satuan pendidikan SMP kurang lebih 22,23% Sekolah Menengah Pertama memenuhi kedelapan standar (SNP) yang ditetapkan pemerintah dari seluruh SMP yang melaporkan dengan lengkap dan benar. Sedangkan 15,15% baru mencapai SPM dari kedelapan standar yang harus dipenuhi oleh sekolah menengah pertama.

Jika dibandingkan dengan sekolah dasar lebih tinggi tingkat pencapaian pada SNP maupun pada SPM. Rendahnya pencapaian ini juga sangat ditentukan oleh kelengkapan pelapor dalam melaporkan EDS secara lengkap atau tidak (dari kepala sekolah yang dilatih yang melaporkan hanya 99 SMP yang lengkap). Hal yang sama dengan SD menyebabkan tingkat ketercapaian menjadi rendah, kebingungan atau kurang pemahamannya pengisian membuat asal-asalan dalam penentuan tingkat tercapai dan ketidak beranian kepala sekolah untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya.

Budaya duplikat dari pekerjaan teman masih melekat pada kepala sekolah dalam melaporkan setiap data yang diminta. Penguasaan pengetahuan yang dimiliki kepala sekolah dalam EDS juga menjadi penyebab untuk melaporkan atau tidak. Hasil laporan kemampuan kepala sekolah dalam pendidikan latihan penguatan kepala sekolah Kalimantan Timur baru mencapai 33,98 kompetensi yang dimiliki dalam penguasaan EDS, (Laporan 2010. hal. 116), sedangkan kemampuan kepala SMP penguasaan EDS baru mencapai 40,63.

Untuk masing-masing standar yang dicapai dapat dijelaskan bahwa, pencapaian SNP atau lebih pada jenjang SMP baru mencapai 23,23% dari seluruh sekolah yang melaporkan, terdapat 59,60% dalam tingkatan SPM (standar pelayanan minimal) atau mencapai tingkat 2 dan dalam standar sarana prasarana serta masih terdapat beberapa SMP yang belum mencapai SPM. Standar isi terdapat 53,54% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 41,41% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar isi.

Pada standar proses tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 51,51% dan 31,31% mencapai SPM. Standar penilaian terdapat 44,44% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 49,49% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar penilaian. Pada standar kompetensi lulusan tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 38,38% dan 43,43% masih mencapai SPM atau pada tingkat 2.

Pencapaian standar pengelolaan terdapat 38,38% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 50,51% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar pengelolaan. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 61,61% dan 38,38% masih mencapai SPM. Standar pembiayaan pencapaian baru mencapai 38,38% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 15,15% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar pembiayaan pada satuan pendidikan SMP.

c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)

Berdasarkan kajian terhadap instrumen evaluasi diri sekolah (EDS) pada satuan pendidikan SMA yang disusun atas dasar delapan SNP, maka dapat disimpulkan dari 60 sekolah yang dijadikan sampel, sebagai prioritas perbaikan dalam rencana peningkatan mutu dan pengembangan sekolah pada RPS/RKs dan RAPBS/RKAS sebagai berikut:

1. Standar Sarana dan Prasarana pada butir 1.1 dan butir 1.2, masing-masing hanya mencapai 10% (6 sekolah, Tingkat 4) dan 36,67% (22 sekolah, Tingkat 3) terhadap standar yang memiliki kategori baik, artinya secara keseluruhan bahwa keberadaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai, dan sekolah belum dalam kondisi terpelihara baik.
2. Standar Isi, pada butir 2.1 dan butir 2.2, masing-masing baru tercapai 11,67% (Tingkat 4) dan 31,67% (Tingkat 3), yang berarti penerapan kurikulum masih belum sesuai dan relevan dengan kebutuhan setempat serta sekolah belum menyediakan bagi pengembangan pribadi peserta didik.
3. Standar Proses pada butir 3.1.; butir 3.2.; butir 3.3.; butir 3.4.; butir 3.5; dan butir 3.6.; masing-masing hanya terpenuhi 6,67%; 11,67%; 6,67%; 5%; 5%; dan 8,33% (untuk Tingkat 4); dan masing-masing 43,33%; 35,00%; 23,33%; 40,00%; 38,33; dan 38,33% (untuk Tingkat 3), sumber belajar yang berupa buku teks masih terbatas, sumber lain tidak mudah didapatkan; berarti pencapaian standar proses belum memenuhi.
4. Standar Penilaian Pendidikan belum terpenuhi, hal ini terlihat hanya 43,33% (butir 4.1), 41,66% (butir 4.2.), dan 43,33% (butir 4.3.) yang berhasil mencapainya. Berarti, masih 50% ke atas masing-masing belum terpenuhi standarnya.
5. Standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi, karena masing-masing hanya 45% pada butir 5.1., dan 45% pada butir 5.2., dan 35% pada butir 5.3. yang mencapainya.
6. Standar Pengelolaan belum terpenuhi, karena hanya 45% (butir 6.1.), 48,33% (butir 6.2.), 38,33% (butir 6.3.), 45% (butir 6.4.), 50% (butir 6.5.), dan 41,67% (butir 6.5.) yang mencapainya. Artinya sekolah dalam kinerja pengelolaan, perbaikan tujuan dan rencana, program pengembangan sekolah, cara pengumpulan dan penggunaan data, dukungan terhadap pengembangan profesi, dan cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sekolah masih belum memadai.
7. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan belum cukup terpenuhi, karena hanya 5% (Tingkat 4), dan 35% (Tingkat 3) sekolah yang mencapainya. Artinya, kebutuhan guru dan pegawai kependidikan pada 24 sekolah telah cukup terpenuhi, sedangkan 36 sekolah lainnya belum terpenuhi.
8. Standar Pembiayaan pada butir 8.1., butir 8.2., dan butir 8.3. Belum terpenuhi, karena hanya 43,33% (butir 8.1.), 40% (butir 8.2.), dan 48,33% sekolah yang baru memenuhi pengelolaan keuangan, dan usaha-usaha sekolah dalam mencari tambahan dukungan pembiayaan. Secara keseluruhan, pencapaian standar 8 masih belum terpenuhi.

Dengan demikian, terhadap pencapaian keseluruhan indikator standar (Standar 1 hingga Standar 8), jenjang pendidikan SMA di Kalimantan Timur belum terpenuhi. (Catatan: SMA se Kalimantan Timur terwakili 60 sekolah). Standar yang dipenuhi setiap sekolah pada SMA/SMK/MA masih cukup bervariasi seperti pada SD dan SMP dari standar 1 sarana prasarana hingga standar 8 pembiayaan. Pada kelompok satuan pendidikan SMA/SMK/MA kurang lebih 28,33% memenuhi kedelapan standar (SNP) yang ditetapkan pemerintah dari

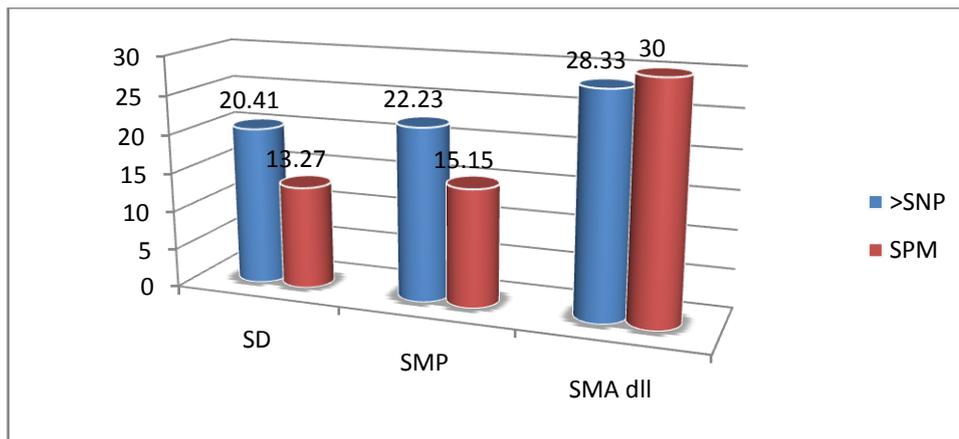
seluruh SMA/SMK/MA yang melaporkan dengan lengkap dan benar. Sedangkan 30,27% cenderung telah mencapai SPM dari kedelapan standar yang harus dipenuhi oleh sekolah dasar. Rendahnya pencapaian ini sangat ditentukan oleh kelengkapan pelapor dalam melaporkan EDS secara lengkap atau tidak (dari 67 sekolah yang melaporkan hanya 60 SMA/SMK/MA yang lengkap).

Hal ini menyebabkan juga tingkat ketercapaian menjadi rendah seperti pada SD dan SMP, kebingungan atau kurang pemahannya pengisian membuat asal-asalan dalam penentuan tingkat tercapai dan ketidak beranian kepala sekola untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya. Budaya duplikat dari pekerjaan teman masih melekat pada kepala sekolah dalam melaporkan setiap data yang diminta. Penguasaan pengetahuan yang dimiliki kepala sekolah dalam EDS juga menjadi penyebab untuk melaporkan atau tidak. Hasil laporan kemampuan kepala sekolah dalam pendidikan latihan penguatan kepala sekolah Kalimantan Timur baru mencapai 33,98 kompetensi yang dimiliki dalam penguasaan EDS, (Laporan 2010. hal. 117), sedangkan kemampuan kepala SMA/SMK/MA penguasaan EDS baru mencapai 40,06.

Untuk masing-masing standar yang dicapai dapat dijelaskan bahwa, pencapaian SNP atau lebih pada jenjang SMA/SMK/MA baru mencapai 43,88% dari seluruh sekolah yang melaporkan, terdapat 41,67% baru dalam tingkatan SPM (standar pelayanan minimal) atau mencapai tingkat 2 dan dalam standar sarana prasarana serta masih terdapat beberapa SMA/SMK/MA yang belum mencapai SPM. Standar isi terdapat 36,67% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 43,33% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar isi. Pada standar proses tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 40,00% dan 33,33% mencapai SPM. Standar penilaian terdapat 40,00% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 41,67% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar penilaian.

Pada standar kompetensi lulusan tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 45,00% dan 41,67% masih mencapai SPM atau pada tingkat 2. Pencapaian standar pengelolaan terdapat 38,33% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 36,67% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar pengelolaan. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan tingkat ketercapaian yang memenuhi SNP atau lebih 40,00% dan 46,67% masih mencapai SPM. Standar pembiayaan pencapaian baru mencapai 36,67% yang telah mencapai SNP atau lebih dan 48,33% sekolah yang masih baru mencapai SPM dalam standar pembiayaan pada satuan pendidikan SMA/SMK/MA.

Perubahan tingkat pencapai SNP dan SPM sejajar dengan tingkat satuan pendidikan dan pencapaian SPM baru mencapai 13,67 - 30,00 persen yang memenuhi SPM dan 20,41 - 28,33 persen telah memenuhi SNP atau lebih dari standar yang ditetapkan berdasarkan laporan yang disampaikan kepala sekolah.



Grafik Capaian SPM dan SNP menurut Jenjang Satuan Pendidikan

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) EDS dapat dipergunakan sekolah sebagai alat untuk mengukur peringkat pencapaian standar nasional pendidikan (SNP), (2) Pada umumnya Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) telah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, meskipun ditemukan pula yang telah melampai standar nasional pendidikan, baru memenuhi standar pelayanan minimal dan di bawah standar pelayanan minimal, (3) Pada umumnya Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) telah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, meskipun ditemukan pula yang telah melampai standar nasional pendidikan, baru memenuhi standar pelayanan minimal dan di bawah standar pelayanan minimal, (4) Pada umumnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/telah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, meskipun ditemukan pula yang telah melampai standar nasional pendidikan, baru memenuhi standar pelayanan minimal dan di bawah standar pelayanan minimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ary, Donald, at all 2002. *Introduction in to research in Education*. Canada: Wadsworth.
- Bogdan, Robert C. and Biklen, Sari Knopp. 1988. *Qualitative Research for Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- LPMP, 2010 Pedoman Diklat Penguatan Kepala Sekolah, Samarinda: LPMP
- Lincoln, Yvonna S., and Guba, Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publications.
- Mantja, Willem. 2003. *Etnografi*. Malang: Wineka Media.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pres.

- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Owens, Robert G. 1991. *Organizational Behavior in Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dilengkapi dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV.Afabeta.
- TIM Dirjen PMPTK. 2010. *Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Apa, Mengapa dan Bagaimana; Bahan Ajar dan Materi Pelatihan dalam Rangka Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah/Madrasah*, Jakarta : Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional.
- TIM Peneliti. 2010. *Analisis kemampuan Kepala Sekolah Dalam Pendidikan dan Latihan Penguatan Kepala Sekolah di Kalimantan Timur*. Samarinda: LPMP Kaltim.